



KOTA DENPASAR

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA TAHUN
ANGGARAN 2023**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



KATA PENGANTAR

Om Swastiastu

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kami dapat menyampaikan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2023.

Rencana Kerja memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka pelaksanaan misi organisasi. Rencana Kerja ini juga dilengkapi dengan indikator kinerja kegiatan dan program sehingga memudahkan untuk mengukur capaian kinerjanya. Selanjutnya Rencana Kerja sebagai komitmen kinerja yang hendak dicapai, diajukan sebagai bahan dalam suatu penetapan kinerja sebagai kesepakatan terhadap Rencana Kerja.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Om Santi , Santi, Santi Om.

Denpasar, 18 Juli 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar



Anak Agung Nengah Bawa Nendra, SH., M.Si
NIP. 670418 199703 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB. II . EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.....	21
2.3. Isu – isu Strategis penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja.....	22
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	23
BAB. III . TUJUAN , SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	32
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	37
3.3. Program dan Kegiatan	37
BAB. IV . RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR.....	44
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan	44
BAB.IV . PENUTUP	48



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar yang berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

Di dalam Pasal 12 Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa masalah penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, maka penyusunan Renja Satpol PP perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kota Denpasar tahun 2021–2026, sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka dilakukan penjabaran ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dalam pengukuran kinerja ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu, perjanjian, pengumpulan data dan cara pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja sebagai dokumen perencanaan ini mengakomodasi faktor politis dan aspiratif sehingga secara resmi mengikat seluruh aparat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dalam melaksanakan kegiatan perekonomian dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, disamping untuk penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.



Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dilaksanakan dengan memperhatikan Visi Kota Denpasar yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Visi : ***“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”*** dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun misi antara lain:

- 1) Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
- 2) Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
- 3) Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- 4) Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
- 5) Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Mengacu kepada visi dan misi Kota Denpasar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Denpasar, maka tugas pokok dan fungsinya adalah: “Membantu Walikota menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat”

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar adalah :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);



- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- k. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang



- Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - n. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016);
 - o. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar 2021 – 2026
 - p. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar 2021 – 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar adalah untuk memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Satpol PP Kota Denpasar Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mencakup :



BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TAHUN LALU
BAB III	:	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	:	PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:
- b. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:
- c. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan:

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2021 diwujudkan dalam 2 Program, 5 kegiatan dan 14 sub kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2021 dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp. 24.010.167.461 dengan realisasi mencapai Rp. 22,016,682,324., dengan persentase serapan dana APBD mencapai 91.70%.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2020 diwujudkan dalam 6 Program dan 11 kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2020 dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp. 6,725,656,913 dengan realisasi sampai bulan Desember mencapai Rp. 6,109,176,876, dengan persentase serapan dana APBD mencapai 90,83%.



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN									

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
					UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	01				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah terbayarnya gaji pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Pegawai yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kontrak dan Pejabat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR



KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
						Pengadaan yang terbayarkan								
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Barang milik Daerah</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan asset tetap yang mendukung operasional kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan operasional kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					Administrasi Kepegawaian Perangkat	<i>Peresntase layanan kepegawaian perangkat</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
	Daerah	<i>daerah</i>								
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah tersedianya pakaian dinas pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan dinas yang layak pakai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
		Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang layak pakai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah peralatan kantor / asset yang layak pakai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
						Bangunan Lainnya								
					PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar								
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda								

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
					Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani								
					<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah</i>	<i>Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang</i>								

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
					<i>Kabupaten/Kota</i>	<i>tertangani</i>								
					Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani								
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi	Jumlah anggota satpol pp yang meningkat								

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
					Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	kompetensinya								
					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota Satian perlindungan Masyarakat yang meningkat komptensinya								



KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
					Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Kepala Daerah	Persentase masyarakat yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada/Peraturan Walikota yang terlayani								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Setelah dilakukan pengukuran dari kinerja Tahun 2021 diperoleh hasil capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar sebesar 95,53%. Dengan capaian kinerja tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dapat dikategorikan sebagai Perangkat Daerah yang baik dalam capaian kinerja.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

NO	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar Meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar	86,38 %	88,11%	89,43%	90,55%					



2.3 Isu Strategis Penyelenggara Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra , maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan polisi Pamong Praja. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dirumuskan sebagai berikut :

Perlunya Peningkatan Kualitas Penegakan Perda dan Perwali serta penanganan gangguan Tramtibum dan Perlindungan Masyarakat Di Kota Denpasar, yang disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat Satpol PP, dengan meningkatkan sinergitas antar lembaga dan partisipasi masyarakat

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD :

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Satuan Polisi Pamong Praja dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Satuan Polisi Pamong Praja disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:



Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tahun 2023

Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Jumlah		
			T-1		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					22,260,920,772

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Jumlah		
			T-1		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar		100 %	22,074,909,382
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar		100 %	16,276,246,100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar		119 Orang	16,276,264,100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar		100 %	258,997,110

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Jumlah		
			T-1		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar		1 Paket	3,566,702
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar		1 paket	173,676,795
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar		1 Laporan	5.400.000

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Jumlah		
			T-1		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar		1 Paket	16,544,349
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Denpasar		4 Bacaan	29,553,264
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar		1 Laporan	30,256,000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR



Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Jumlah		
			T-1		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar		100 %	3,948,628,380
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Denpasar		1 laporan	211,800,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar		1 laporan	3,736,828,380

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR



Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Jumlah		
			T-1		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang milik Daerah	Kota Denpasar		100 %	340,000,000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Denpasar		0 Unit	0

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Jumlah		
			T-1		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Denpasar		1 Unit	340,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peresntase layanan kepegawaian perangkat daerah	Kota Denpasar		100 %	298,372,592
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Denpasar		0 Orang	0

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Jumlah		
			T-1		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Denpasar		242 paket	298,372,592
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai	Kota Denpasar		100 %	952,647,200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Denpasar		54 Unit	776,432,200

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR



Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Jumlah		
			T-1		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Denpasar		9 Unit	3,465,000
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				136 Unit	122,750,000
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Jumlah		
			T-1		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar		1 Unit	50,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	Kota Denpasar		89.34%	186,011,390

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR



Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Jumlah		
			T-1		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3			88.11%	
	Rasio Satlinmas			3,2	

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Jumlah		
			T-1		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani	Kota Denpasar		250 Kasus	111,373,821
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Kota Denpasar		1 Laporan	111,373,821

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Jumlah		
			T-1		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	Kota Denpasar		250 Kasus	74,637,569
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Denpasar		250 Kasus	72,389,340

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR**



Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Jumlah		
			T-1		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Denpasar		0 Orang	0
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Denpasar		0 Dokumen	0

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DENPASAR



Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Jumlah		
			T-1		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kota Denpasar		1 Laporan	2,248,229



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .

Di era reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara *top down* akan tetapi juga secara *bottom up* artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses Musrenbang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan polisi Pamong Praja Tahun 2021 juga mengakomodir berbagai usulan dari para *stakeholders* seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Satuan polisi Pamong Praja terkait rencana pencapaian target RPJMD Kota Denpasar dan Renstra Satuan polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional.

Berdasarkan Undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Di dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada.

Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan definisi Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat

Dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa “ Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa “ Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ”.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar, Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan :

Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar

b. Sasaran :

Meningkatnya Kualitas layanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar

3.3 Program, Kegiatan dan sub kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian program adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan visi dan misi Kota Denpasar.

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2023 maka program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program Kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi				
								Indikator			
									Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Perkiraan Maju 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					22,260,920,772	27,847,381,989
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja Perangkat Daerah	100 %	22,074,909,382	27,131,632,569
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan	100 %	16,276,246,100	19,785,666,702

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi				
								Indikator			
									Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Perkiraan Maju 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang	16,276,264,100	19,785,666,702
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	258,997,110	719,444,605
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,566,702	4,673,370

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi				
								Indikator			
									Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Perkiraan Maju 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	173,676,795	201,237,486
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.400.000	18,630,000
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16,544,349	19,148,650
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Bacaan	29,553,264	33,465,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi				
								Indikator			
									Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Perkiraan Maju 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30,256,000	441,255,000
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3,948,628,380	4,559,839,111
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	211,800,000	229,800,000
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3,736,828,380	4,408,039,111

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi				
								Indikator			
									Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Perkiraan Maju 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase pemenuhan kebutuhan Barang milik Daerah	100 %	340,000,000	603,934,000
1	5	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	258,934,000
1	5	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	340,000,000	345,000,000
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Peresntase layanan kepegawaian perangkat daerah	100 %	298,372,592	778,941,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi				
								Indikator			
									Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Perkiraan Maju 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	184,000,000
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	242 Paket	298,372,592	594,941,000
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai	100 %	952,647,200	1,126,097,250

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi				
								Indikator			
									Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Perkiraan Maju 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	54 Unit	776,432,200	888,909,750
1	5	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	9 Unit	3,465,000	4,025,000
1	5	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	136 Unit	122,750,000	141,162,500

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi				
								Indikator			
									Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Perkiraan Maju 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	50,000,000	57,500,000
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	89.34%	186,011,390	715,749,420
								Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	88.11%		
1	5	2	2.02					Rasio Satlinmas	3,2		
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang	250 Kasus	111,373,821	221,963,340

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi				
								Indikator			
									Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Perkiraan Maju 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								tertangani			
1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	1 Laporan	111,373,821	221,963,340
1.	05.	01	02.2.		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	250 Kasus	74,637,569	785,342,718

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi				
								Indikator			
									Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Perkiraan Maju 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	250 Kasus	72,389,340	456,073,600
1.	05.	01	02.2.	2							
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang	0	184,000,000
1.	05.	01	02.2.	5							

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi				
								Indikator			
									Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Perkiraan Maju 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	05.	01	02.2.	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen	0	188,470,740
					Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Kepala Daerah		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	2,248,229	5,381,518



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SAT.POLPP KOTA DENPASAR

4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bias membantu perangkat daerah mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya rencana perangkat daerah, dalam hal ini pimpinan akan memahami skala prioritas dengan lebih baik. Rencana kerja juga dapat membantu aparatur dalam perangkat daerah melaksanakan kegiatan dengan baik dan teratur, disamping itu rencana kerja yang tersusun dengan baik, akan menghasilkan pembagian tugas yang baik pula. Sebagaimana diuraikan dalam Bab III, mengenai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk 5 tahun kedepan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Dalam pelaksanaan pembangunan urusan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 ini seluruh kegiatan diarahkan untuk mendukung kesuksesan visi misi Kota Denpasar dan visi misi Walikota – Wakil Walikota terpilih serta merealisasikan target pada urusan wajib pelayanan dasar, untuk lebih jelasnya pada tabel dibawah ini akan diauraikan lebih lanjut keterkaitan sasaran, indikator sasaran, target yang ditetapkan pada tahun 2023 serta program, kegiatan, dan sub kegiatan pendukungnya disertai dengan sumber pendanaannya



Tabel 4.1
Rencana Program Kegiatan sub kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar Tahun 2023

Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Jumlah		
			T-1		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					22,260,920,772
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar		100 %	22,074,909,382
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar		100 %	16,276,246,100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar		119 Orang	16,276,264,100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar		100 %	258,997,110
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar		1 Paket	3,566,702
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar		1 paket	173,676,795
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar		1 Laporan	5.400.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar		1 Paket	16,544,349



Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Jumlah		
			T-1		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Denpasar		4 Bacaan	29,553,264
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar		1 Laporan	30,256,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar		100 %	3,948,628,380
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Denpasar		1 laporan	211,800,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar		1 laporan	3,736,828,380
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang milik Daerah	Kota Denpasar		100 %	340,000,000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Denpasar		0 Unit	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Denpasar		1 Unit	340,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peresntase layanan kepegawaian perangkat daerah	Kota Denpasar		100 %	298,372,592



Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Jumlah		
			T-1		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Denpasar		0 Orang	0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Denpasar		242 paket	298,372,592
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai	Kota Denpasar		100 %	952,647,200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Denpasar		54 Unit	776,432,200
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Denpasar		9 Unit	3,465,000
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar		136 Unit	122,750,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar		1 Unit	50,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	Kota Denpasar		89.34%	186,011,390
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3			88.11%	



Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Jumlah		
			T-1		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
	Rasio Satlinmas			3,2	
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani	Kota Denpasar		250 Kasus	111,373,821
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Kota Denpasar		1 Laporan	111,373,821
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	Kota Denpasar		250 Kasus	74,637,569
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Denpasar		250 Kasus	72,389,340
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Denpasar		0 Orang	0



Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Jumlah		
			T-1		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Denpasar		0 Dokumen	0
Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kota Denpasar		1 Laporan	2,248,229



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tahun 2023 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2023 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJMD daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 serta mengacu pada evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. Renja ini merupakan acuan / pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja pemerintah daerah Kota Denpasar. Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2023 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak berkepentingan.

Denpasar, 18 Juli 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar



Anak Agung Nendrah Bawa Nendra, SH., M.Si
NIP. 6670418 199703 1 002



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/2074/HK/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah salah satunya meliputi penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk efektivitas penyusunan Rencana Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2023 dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);

16. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pembahasan indentifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
 - b. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar;
 - c. melakukan pengkajian dan evaluasi renja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tahun sebelumnya berdasarkan Renstra pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar;
 - d. melakukan penentuan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar;
 - e. melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar;
 - f. melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dengan arah rencana pembangunan Kota Denpasar;
 - g. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar;
 - h. melaksanakan sinkronasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergisitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Walikota kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar;
 - i. melaksanakan penentuan program, kinerja, dan subkegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan, dan penganggaran terpadu;
 - j. bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelsaksaan tugas kepada Walikota melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Desember 2021

a.n Walikota Denpasar
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar,



Drs. I Dewa Gede Anom Sayoga, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611231 198503 1 166

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. Tim Penyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Denpasar
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 188.45/2074/HK/2021
TANGGAL : 9 DESEMBER 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
DENPASAR

Penasehat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
Ketua : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Denpasar
Kelompok Kerja : 1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
2. Kepala Bagian Penegakan Peraturan Daerah Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
3. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Denpasar
4. Kepala Bidang Sumberdaya Aparatur Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Denpasar
5. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
6. Kepala Seksi Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar
7. Kepala Seksi Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar
8. Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan, dan Pengawasan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
9. Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penindakan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
10. Kepala Seksi Deteksi Dini dan Evaluasi Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Denpasar
11. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Denpasar
12. Kepala Seksi Pengerahan dan Pengendalian Linmas
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
13. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Denpasar
14. Kepala Seksi Data dan Pengembangan Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Denpasar
15. Kepala Seksi Teknis Fungsional Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Denpasar
16. Kepala Seksi Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Denpasar
17. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
18. Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Denpasar

Administrasi : Staf Pada Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 2 (dua) orang
yaitu :
1. I Made Adi Suwandana, SE, MM
2. Gede Wijaya

a.n. Walikota Denpasar
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar,



Drs. I Dewa Gede Anom Sayoga, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611231 198503 1 166